



# Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I 2025

DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



# Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan periode Triwulan I Tahun 2025 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 April 2025

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



**Ukon Ahmad Furkon**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2029	6
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	7
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
3.2.1	PENGELOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	13
3.2.2	PENGELOLAAN PERIZINAN SESUAI KETENTUAN	16
BAB IV	AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB V	PENUTUP	
5.1	KESIMPULAN	26
5.2	SARAN	28

DATA DUKUNG

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2025
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2025
TABEL 3	RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN KEGIATAN (SK) DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2025
TABEL 5	PERSENTASE KUB YANG MENINGKAT KAPASITASNYA
TABEL 6	PERSENTASE NELAYAN YANG TERFASILITASI PENGEMBANGAN USAHANYA
TABEL 7	NELAYAN YANG DIFASILITASI KEPEMILIKAN TANAHNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI TANAH NELAYAN
TABEL 8	KAMPUNG NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN DAN DIFASILITASI PENATAANNYA MELALUI ROGRAM KAMPUNG NELAYAN MAJU (KALAJU)
TABEL 9	PERSENTASE NELAYAN YANG TERLINDUNGI
TABEL 10	ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 11	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN
TABEL 12	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI
TABEL 13	TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 14	PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR
TABEL 15	PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 16	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 17	INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 18	NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 19	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 20	PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 21	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 22	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 23	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

---

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. PDK
GAMBAR 2	DASHBOARD KINERJAKU CAPAIAN KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
GAMBAR 3	DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN I DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2024

---

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.050.000.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2025 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2025 Tanggal 02 Desember 2024. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2025, memiliki 3 Sasaran Kerja yang didukung oleh 18 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2025	Triwulan I	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan bersaing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	39,73	88,29
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	24,29	24,29
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000	1.250	25
		4	Kampung nelayan yang dikembanagkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (kalaju)	1	-	-
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	11,25	11,25
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	2.795	23,29
		7	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan Yang diterbitkan	9.000	2.653	29,48

		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	-	-
		9	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3	-	-
		10	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	94,6	103,96
		11	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	66,34	69,53
		12	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	97,84	97,84
3	Terwujudnya Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	13	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	87	-	-
		14	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	88	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayannya (persen)	15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	81	-	-
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	85	60	70,59

		17	Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,5	88,57	100,08
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	98	--	

# Bab 1. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2025, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2025.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

## **1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

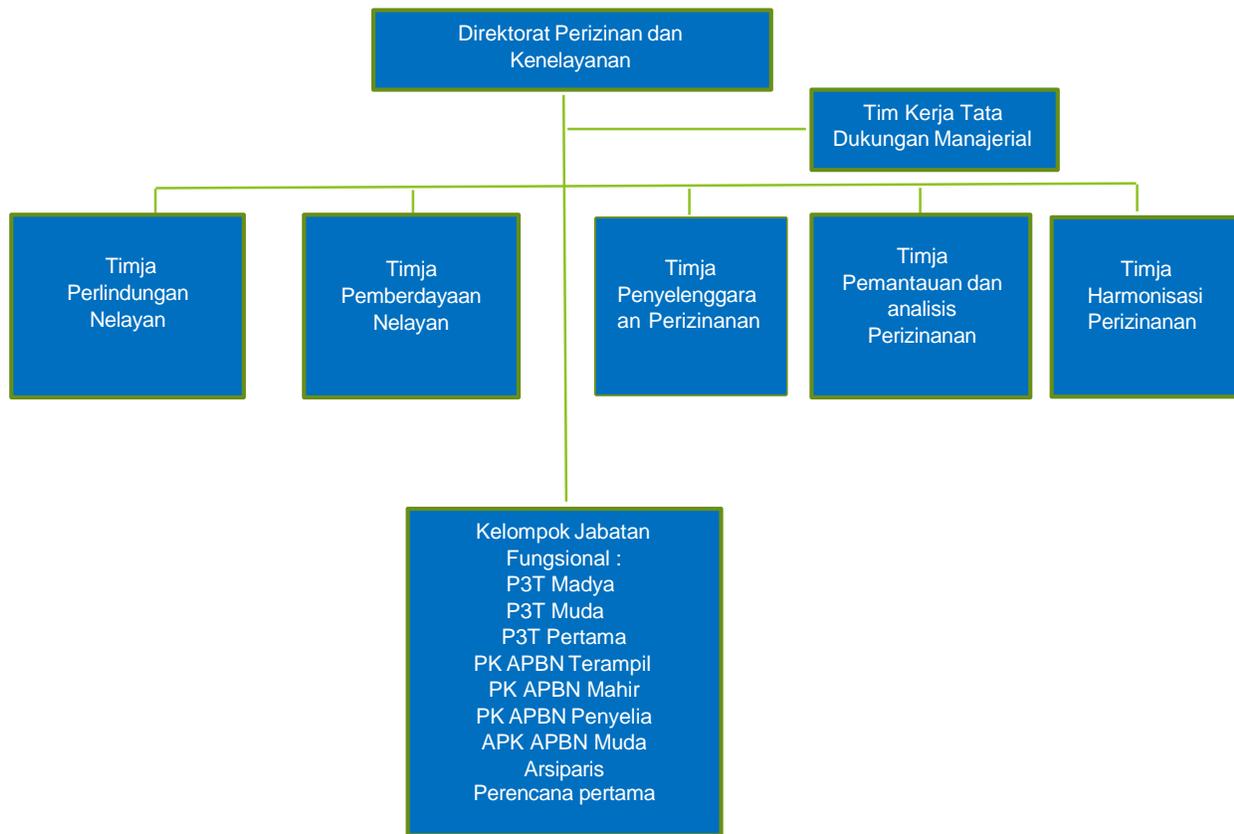
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Perizinan dan

Kenelayanan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Tim Kerja Perlindungan Nelayan**, yang terdiri atas Sub Pokja Kelembagaan Usaha Nelayan dan SubPokja Pengembangan Usaha Nelayan,
- b. **Tim Kerja Pemberdayaan Nelayan**, terdiri atas SubPokja Perlindungan Nelayan dan SubPokja Pemberdayaan Nelayan,
- c. **Tim Kerja Penyelenggaraan Perizinan**, yang terdiri atas SubPokja Perizinan Usaha Perikanan dan SubPokja Perizinan Kapal Perikanan
- d. **Tim Kerja Pemantauan dan Analisis Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Pemantauan Perizinan dan SubPokja Analisis Perizinan,
- e. **Tim Kerja Harmonisasi Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Sistem Informasi dan Pertukaran Data Perizinan dan SubPokja Integrasi Perizinan Pusat dan Daerah
- f. **Timja Kerja Dukungan Manajerial**; dan
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
  - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
  - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
  - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
  - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
  - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Mahir
  - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
  - Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Muda
  - Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
  - Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama
  -



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan per triwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulanan sebagai berikut :

##### 1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

## **2. Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

## **3. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

## **4. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

## **5. Bab IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

## **6. Lampiran**

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari Upaya mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, Pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengurangan ketimpangan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama Pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi struktural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi. (2) Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan Tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2026. (3) Pengembangan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Sektor kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

**Misi** Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan yang sederhana dan terintegrasi;
2. Melakukan harmonisasi dan pemantauan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
3. Meningkatkan kelembagaan dan perlindungan nelayan melalui program pemberdayaan dan akses terhadap sumber daya.
4. Menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.

## Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki MOTO '**Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi**'. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Perizinan dan Kenelayanan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

## 2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2024 – 2029, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2025. Dimana pada Tahun 2025 ini, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah menetapkan sasaran kegiatan (SK) sebanyak 3 SK dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 18 IKU.

**Tabel 1.** Rencana Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
<b>INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE</b>				
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (Kalaju)	1

		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91
		9	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3
		10	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
		11	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95
		12	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE</b>				
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	13	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	87
		14	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	88
		15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	81
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	85
		17	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,5
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	98

Pada Tahun 2025 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan telah melalui beberapa revisi. Revisi terakhir adalah sebesar Rp. 16.050.000.000,- Triliun dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.175.000
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap ( SIUP ) yang diterbitkan	350.000
3	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan	1.000.000

	nelayan	
4	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	600.000
5	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	999.999
6	Nelayan yang yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	999.999
7	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.000.000
8	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (MP Korporasi)	500.000
9	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	800.000
10	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (ocean for prosperity project) Lautra	1.000.000
11	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3.500.000
12	Rekomendasi kebijakan penangkapan terukur yang dilaksanakan	4.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>16.050.000</b>

### 2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

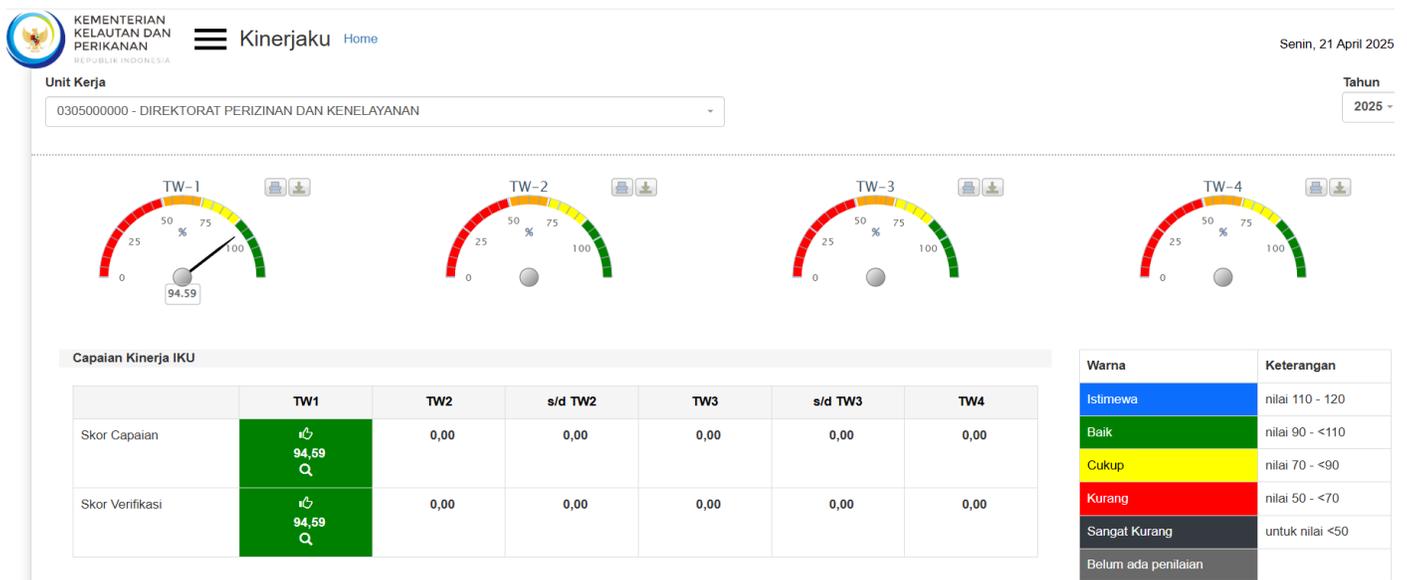
NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1 Penyusunan / reuiu juknis kelembagaan nelayan
		2 Sosialisasi dan identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi nelayan)
		3 Supervisi dan evaluasi penguatan kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi)
		4 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui Lembaga keuangan
		5 Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan

		dan usaha keluarga nelayan
		6 Penyusunan juknis kampung nelayan maju
		7 Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kampung nelayan maju
		8 Pendataan identitas nelayan
		9 Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungan
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan perizinan pusat dan daerah</li> <li>2. Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah</li> <li>3. Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP)</li> </ol>
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	<p>Meningkatkan kompetensi pegawai melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 seminar, bimbingan tekhnis dan pelatihan – pelatihan , Memberikan kesempatan kepada pegawai lingkup Dit. PDK untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar.</li> <li>2 Melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>3 Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. PDK Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan</li> <li>4 Melaksanakan tindak lanjut dari setiap hasil temuan pengawasan</li> <li>5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan</li> <li>6 Khususnya kegiatan prioritas Mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam</li> <li>7 rangka percepatan penyerapan anggaran Meningkatkan dan melakukan perbaikan layanan di setiap unit kerja layanan</li> </ol>

# Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menggunakan aplikasi [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh nilai sebesar 94,59%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama yang memperoleh capaian sebesar 99,42%. Pada Tahun 2025, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki 3 Sasaran kegiatan dan 18 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada periode Triwulan I Tahun 2025 sudah baik. Hal ini bisa kita lihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

**Tabel 4.** Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Triwulan I, Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024		
				Triwulan I	% thd Target	
<b>INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE</b>						
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	39,73	88,29
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	24,29	24,29
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000	1.250-	25
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	1	--	-
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	11,25	11,25
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	2.795	23,29
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9000	2.653	29,48
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91		
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3		
		10	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	94,6	103,96
		11	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	66,34	69,83
		12	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	97,84	97,84
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	13	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Indeks)	87	-	-
		14	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	88	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2024	
				Triwulan I	% thd Target
		15 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	81	-	-
		16 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	85	60	70,59
		17 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,5	88,57	100,08
		18 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	98	-	-

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

#### 3.2.1 Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (Lima) indikator yakni (1) Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya, (2) Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (3) Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (4) Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju, (5) Persentase nelayan yang terlindungi

##### 1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang meningkat kapasitasnya

Persentase Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya adalah kelompok usaha bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi (1) pembinaan kelembagaan (KUB) dan (2) Kegiatan pengembangan kelembagaan nelayan yang berbasis korporasi nelayan ). Adapun jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025 sebanyak 2000 KUB. Capaian KUB yang mendapat pembinaan untuk ditingkatkan kapaitasnya sebnyak 89 KUB. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan pembinaan melalui pengambangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi sebanyak 10 KUB sedangkan Capaian KUB yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan melalui pengambangan kelembagaan berbasis korporasi sebanyak 40 KUB. Adapun capaian persentase KUB yang meningkat kapasitasnya adalah sebesar 39,73% atau sebesar 88,29% dari target triwulan satu atau 88,29% dari target tahunan.

**Tabel. 5 Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen).	45	39,73	88,29

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya karena perhitungan IKU ini berbeda dengan IKU tahun sebelumnya. Meskipun demikian kegiatan peningkatan KUB merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, namun tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

## 2. Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya .

Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya adalah jumlah nelayan yang diharapkan dapat difasilitasi pengembangan usahanya melalui (1) Kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya, (2) Kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan.

**Tabel. 6 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	45	39,73	113,26

## 3. Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan .

Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan adalah nelayan yang memiliki tanah baik lahan hunian maupun lahan kosong/produktif untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi bersertifikat sesuai dengan ketentuan. Kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif ( *liquid capital* ) menjadi modal aktif ( *active capital* ) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan (bank dan non bank). Adapun kegiatan dilakukan berupa sosialisasi pra dan pasca SeHAT nelayan, identifikasi lapang dan pendampingan. Target tahun 2025 sebanyak 5.000 CPCL. Sampai saat ini baru tercapai sebanyak 1.250 CPCL atau sebesar 25% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

**Tabel. 7 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan**

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan.	5.000	1.250	25

**4. Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju .**

Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju adalah kampung nelayan yang dibangun atau diperbaiki fasilitas umum dan fasilitas usahanya melalui kegiatan yang berasal dari pendanaan oleh instansi pemerintah, BUMN, Swasta atau swadaya masyarakat. Tujuan dari penataan kampung nelayan maju (kalaju) adalah adalah terciptanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Pada tahun 2025 IKU ini ditargetkan sebanyak 1 lokasi yaitu di Bulungan Kalimantan Utara. Adapun pelaporan capaian IKU ini baru bisa dilaporkan pada akhir tahun karena periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

**Tabel. 8 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju**

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju	1	-	-

**5. Persentase nelayan yang terlindungi .**

Persentase nelayan yang terlindungi adalah nelayan yang terlindungi dalam kegiatan penangkapan ikan baik terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan. Fasilitas yang dilakukan dapat berupa penyediaan logistic perbekalan melaut maupun fasilitas asuransi nelayan mandiri. Tujuan fasilitas asuransi nelayan mandiri adalah untuk menjembatani mitra asuransi untuk dapat menyampaikan informasi terkait produk asuransi nelayan yang dimiliki kepada nelayan. Selain itu fasilitas asuransi nelayan mandiri juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nelayan untuk dapat berasuransi secara mandiri, mengingat nelayan merupakan profesi yang rentan terhadap resiko kecelakaan. Jumlah nelayan yang ditargetkan teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan sebanyak 50.000 sedangkan jumlah nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan

nelayan sampai dengan triwulan I sebanyak 5.626 orang nelayan berdasarkan aplikasi KUSUKA . Adapun capaian IKU ini sampai dengan TW I adalah 11,25%.

Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama karena metode perhitungan berbeda dengan metode perhitungan tahun sebelumnya sehingga hasil capaian juga berbeda.

**Tabel. 9 Persentase nelayan yang terlindungi**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase nelayan yang terlindungi	100	11,25	11,25

### 3.2.2 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (6) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Adapun capaian indikator dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Dan yang terbaru saat ini adalah adanya aplikasi E-PIT yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi ini menitik beratkan pada penangkapan ikan terukur. Sampai saat ini aplikasi ini juga masih terus dilakukan sosialisasi.

#### 1. **Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.**

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Adapun

keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi.

**Tabel. 10 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan**

Satuan : alokasi kapal

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	12.000	2.795	23,29

**2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan .**

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) yang diterbitkan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi . Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan). Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini juga bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 (triwulan IV) terdapat perubahan dimana capaian yang dihitung tidak lagi berupa persentase. Capaian dihitung dari jumlah dokumen perizinan yang terbit saja (realisasi kapal). Dengan demikian perbandingan IKU ini belum dapat dilakukan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel. 11 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan**

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	2.653	29,48

**3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti**

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi hasil analisis perizinan yang ditindaklanjuti berupa permohonan suspend kapal. Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

**Tabel.12 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti**

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	-	-

**4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil resiko. Tingkat profil resiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Semakin tinggi profil resiko, maka tingkat kepatuhan semakin rendah. Analisis profil resiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

1. Kepemilikan asset wajib bayar
2. Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi
3. Ketepatan waktu pembayaran PNBPNP.

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil resiko sbb :

- Nilai total skor  $\leq 1$  = Risiko sangat rendah
- Nilai total skor  $> 1 - 2$  = Risiko rendah
- Nilai total skor  $> 2 - 3$  = Resiko sedang
- Nilai total skor  $> 3 - 4$  = Risiko tinggi
- Nilai total skor  $> 4 - 5$  = Risiko sangat tinggi

Dari penilaian profil risiko tersebut selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia (Izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan.

**Tabel.13 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan**

Satuan : skala/nilai

Nama IKU	Target Tahun 2024	Capaian TW I	%
Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	-	-

Adapun periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga pencapaian IKU pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

**5. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.**

Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur adalah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap .

**Tabel.14 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Capaian TW I	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	91	94,6	103,96

Adapun capaian IKU Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur adalah sebesar 94,6% atau sebesar 103,96% dari target.

**6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan .**

Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi. Adapun capaian IKU Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sampai dengan triwulan I adalah 66,34% atau sebesar 69,83% dari target. Pencapaian IKU ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena layanan aplikasi perizinan yang selama ini digunakan sudah tidak dapat diakses lagi.

**Tabel.15 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95	66,34	69,83

**7. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .**

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA center atau melalui CM Bitrix yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan.

**Tabel.16 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95	66,34	69,83

### 3.2.3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 6 (Enam) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat perizinan dan kenelayanan (3) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat perizinan dan kenelayanan (5) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan.

#### 1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan I belum dapat dilakukan.

**Tabel. 17 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan**

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian T W I	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan	87	-	-

## 2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan ( perencanaan strategik, perencanaan kerja ). Adapun **capaian** nilai penilaian mandiri SAKIP Dit. Perizinan dan Kenelayanan pada triwulan I belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

**Tabel 18. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan**

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I 2025	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	88	-	-

## 3. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Adapun kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
- Memiliki anggaran yang besar
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP
- Mendukung capaian prioritas nasional
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan

**Tabel. 19 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan I	%
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	80	-	-

Adapun capaian IKU ini belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

#### 4. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024. Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan terdapat 2 temuan yang menjadi objek pengawasan yakni hasil evaluasi kegiatan pengembangan korporasi pada Dit. PDK tahun 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan dengan 3 rekomendasi. Jadi masih tersisa 1 temuan 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti . sehingga capaian triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 60%. Atau sebesar 70,59% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian IKU ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya pada periode yang sama, yang mencapai 95%.

**Tabel. 20 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan I	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	85	60	70,59

#### 5. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8)

Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 88,57 atau sebesar 100,08% dari target.

**Tabel. 22 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan**

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW I	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	88,5	88,57	100,08

## 6. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana Tahun 2025 ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar – besaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggaran maupun secara volume. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

**Tabel. 23 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan kenelayanan.**

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan	98	98	-	-

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.050.000.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-DIPA-032.03.1.238720/2024 tanggal 02 Desember 2024. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan anggaran pemerintah seperti efisiensi anggaran maka pada periode Triwulan I tahun 2025, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan setelah melalui revisi anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.142.751.000,-** miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 18.161.901,- juta atau sebesar 0,58% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2025, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

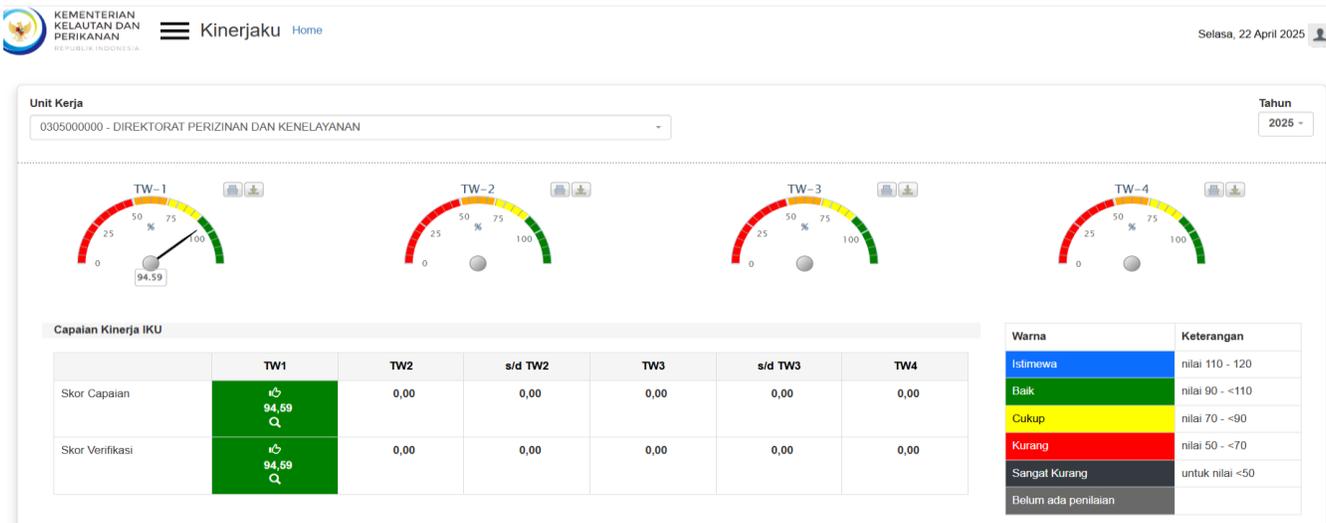
**Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025, Berdasarkan jenis kegiatan**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	79.250.000,-	-	-
2.	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	350.572.000,-	-	-
3.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	57.625.000,-	-	-
4.	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	296.485.000,-	-	-
5.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	216.713.000,-	-	-
6.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	240.711.000,-	-	-
7.	Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	236.460.000,-	-	-
8.	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	587.787.000,-	-	-
10.	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	157.501.000,-	18.161.901,-	11,53
11	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	949.647.000,-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.142.751.000,-</b>	<b>18.161.901,-</b>	<b>11,53</b>

# PENUTUP

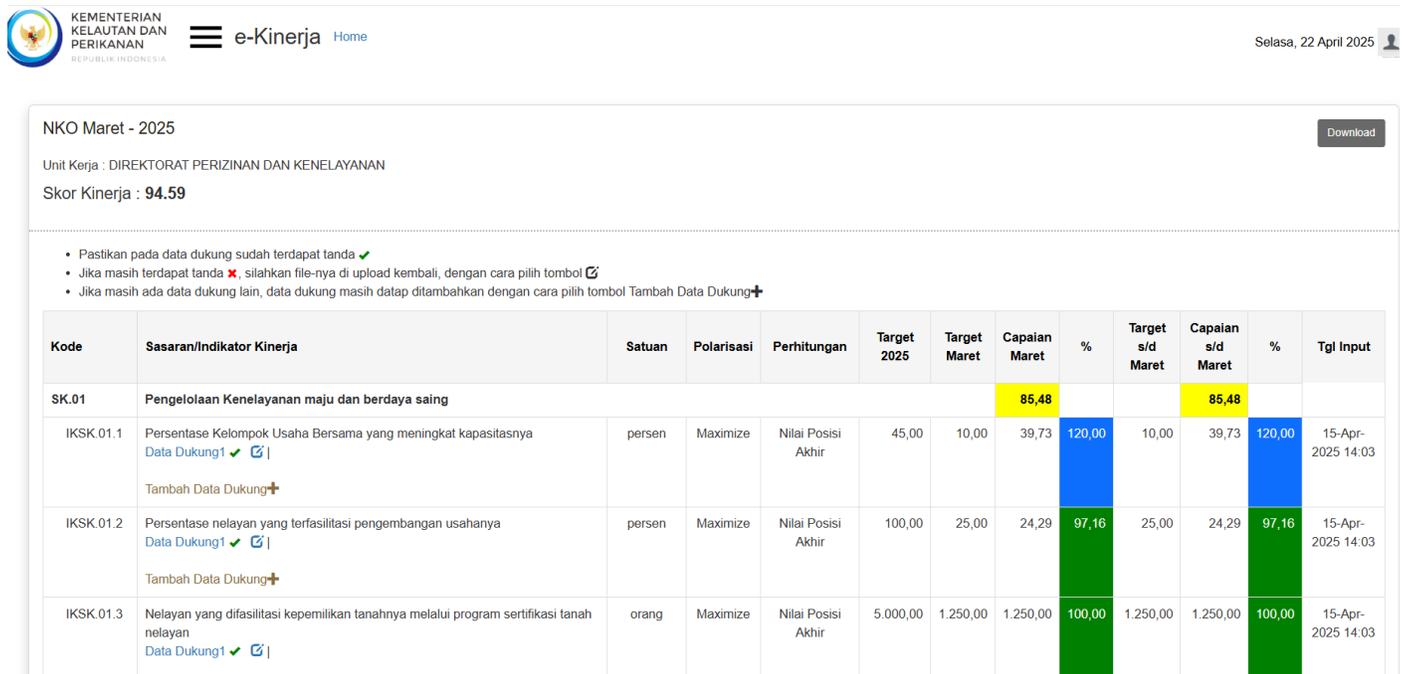
## 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 99,42 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



**Gambar 3**

*Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2025*



IKSK.01.4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju Tambah Data Dukung+	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.01.5	Persentase nelayan yang terlindungi Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	25,00	11,25	45,00	25,00	11,25	45,00	15-Apr-2025 14:03
<b>SK.02</b>	<b>Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan</b>											
IKSK.02.06	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12.000,00	3.000,00	2.795,00	93,17	3.000,00	2.795,00	93,17	15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.07	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9.000,00	2.250,00	2.653,00	117,91	2.250,00	2.653,00	117,91	15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.08	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.09	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.10	Persentase provinsi yang dirasisasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	25,00	94,60	120,00	25,00	94,60	120,00	15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.11	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	25,00	66,34	120,00	25,00	66,34	120,00	15-Apr-2025 14:03
IKSK.02.12	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	25,00	97,84	120,00	25,00	97,84	120,00	15-Apr-2025 14:03
<b>SK.03</b>	<b>Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</b>											
IKSK.03.13	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.03.14	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tambah Data Dukung+	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.03.15	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
IKSK.03.16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	60,00	70,59	85,00	60,00	70,59	15-Apr-2025 14:03
IKSK.03.17	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	indeks	Maximize	Rata-rata	88,50	88,50	88,57	100,08	88,50	88,57	100,08	15-Apr-2025 14:03
IKSK.03.18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 14:03
<span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">Tutup</span>												

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sudah baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna hijau pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti baik (*gambar dashboard kinerjaku*), dan jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama (triwulan I), capaian ini lebih rendah. Dimana tahun lalu pada periode yang sama memperoleh angka sebesar 99,42%.

## 4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
  - a. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
  - b. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
  - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
  - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

## DATA DUKUNG CAPAIAN

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Lampiran 1. Memorandum  
Nomor : 20/DJPT.5/RC.610/IV/2025  
Tanggal : 15 April 2025

**MEMORANDUM  
NOMOR 20/DJPT.5/RC.610/IV/2025**

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Dari : Direktur Perizinan dan Kenyelayan  
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Direktorat Perizinan dan Kenyelayan Triwulan I, Tahun 2025  
Lampiran : satu berkas  
Tanggal : 15 April 2025

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I, Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenyelayan Triwulan I, Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

  
Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenyelayan Triwulan I, Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
			Tahun 2025	Triwulan I	Persentase (%)
1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	39,73	88,29
		Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	24,29	24,29
		Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanah/nya melalui program sertifikasi tanah nelayan (persen)	3000	1.250	25
		Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (Kalamu)	1	-	-
		Persentase nelayan yang terlatih	100	11,25	11,25
2 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan (Alokasi kuota)	12.000	2.795	23,29
		Dokumen perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	2.053	22,81
	8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan penangkapan ikan yang ditindaklanjuti	91	-	-
	9	Indeks ketepatan pelaku usaha subsector penangkapan ikan dan penangkapan ikan (skala 0-100)	3	-	-
	10	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha	91	94,6	103,96

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
			Tahun 2025	Triwulan I	Persentase (%)
	11	subsector penangkapan ikan dan penangkapan ikan kewenangan Gubernur (persen) penangkapan ikan dan penangkapan ikan (persen)			
		Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan penangkapan ikan (persen)	95	66,34	69,53
		Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan subsector penangkapan ikan	100	97,84	97,84
3 Tersedianya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayan	13	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (indeks)	87	-	-
		Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perizinan dan Kenyelayan	88	-	-
	15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas strategis Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (persen)	81	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayan	85	60	70,59
		Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (indeks)	88,5	88,57	100,08
		Persentase pemyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenyelayan	98	-	-

Lampiran 2. Memorandum  
Nomor : 20/DJPT.5/RC.610/IV/2025  
Tanggal : 15 April 2025

- a. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing, IKU 1. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

**PERSENTASE KELOMPOK USAHA BERSAMA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA**

IKU	Subsahaja	Skor IKU	Bobot	Skor Bobot
1	45	95	1	42,75
2	100	95	1	95,00
<b>Jumlah</b>	<b>145</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>137,75</b>
<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Per</b>	<b>145</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>137,75</b>
<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Per</b>	<b>145</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>137,75</b>

**FORMULA PERSENTASE**  
$$P = \left( \frac{SKB_{IKU}}{SKB_{IKU} + SKB_{IKU}} \right) \times 100$$

Keterangan:  
 IKU : Indikator Kinerja Utama  
 SKB : Skor Bobot  
 P : Persentase

- b. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing, IKU 2 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya.

**PERSENTASE NELAYAN YANG TERFASILITASI PENGEMBANGAN USAHANYA**

IKU	Subsahaja	Skor IKU	Bobot	Skor Bobot
1	100	95	1	95,00
2	100	95	1	95,00
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>190,00</b>
<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Per</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>190,00</b>
<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Per</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>190,00</b>

**FORMULA PERSENTASE**  
$$P = \left( \frac{SKB_{IKU}}{SKB_{IKU} + SKB_{IKU}} \right) \times 100$$

Keterangan:  
 IKU : Indikator Kinerja Utama  
 SKB : Skor Bobot  
 P : Persentase

Lampiran 3. Memorandum Nomor : 207/DJPT.5/RC.610/IV/2025 Tanggal : 15 April 2025

c. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing IKU 3 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

Table with 3 columns: NO, PROVINSI-KABUPATEN/KOTA, CAPAIAN PERSEN KEBERHASILAN. Lists provinces like Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah with their respective percentages.

Table titled 'NILAI RATA-RATA BERTYAS 2014-2023 SERTIFIKASI TANAH NELAYAN KELURAH NEGERI'. Columns: NO, PROVINSI-KABUPATEN/KOTA, NILAI RATA-RATA. Lists provinces like Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah with their average values.

Lampiran 5. Memorandum Nomor : 207/DJPT.5/RC.610/IV/2025 Tanggal : 15 April 2025

e. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 6. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (alokasi kapal).

Table with 4 columns: Nomor, Mula, Tanggal, Jumlah, and another column. Lists various dates and numbers, likely representing permit data.

Lampiran 4. Memorandum Nomor : 20/DJPT.5/RC.610/IV/2025 Tanggal : 15 April 2025

d. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing IKU 5 Persentase nelayan yang terindungi.

Table titled 'FORMULIR PERNYATAAN Persentase nelayan yang terindungi (FPJU/TFPU) x 100 %'. Includes a 'Keterangan' box with definitions for FPJU and TFPU.

Table with 4 columns: NO, URAIAN, JUMLAH, and another column. Lists various items and their quantities.

Lampiran 6. Memorandum Nomor : 20 /DJPT.5/RC.610/IV/2025 Tanggal : 15 April 2025

f. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 7. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)

Table with 4 columns: NO, JABAT/PEKERJA, JENJANG PANGKAT, and another column. Lists various job titles and ranks.

g. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 10. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

No	Provinsi	Persentase (%)
1	ACEH	100
2	BALI	100
3	BANTEN	100
4	BENGKULU	100
5	DI. YOGYAKARTA	100
6	DKI. JAKARTA	100
7	BOGORNTAL	100
8	JAWA BARAT	100
9	JAWA TENGAH	100
10	JAWA TIMUR	100
11	KALIMANTAN BARAT	100
12	KALIMANTAN SELATAN	100
13	KALIMANTAN TIMUR	100
14	KALIMANTAN UTARA	100
15	KEPULAUAN BANGKA BEL.	100
16	KEPULAUAN MERU	100
17	LAMPUNG	100
18	HALUO	100
19	HALUO UTARA	100
20	LAGA TENGGARA BARAT	100
21	LAGA TENGGARA TIMUR	100
22	PAPUA	100
23	PAPUA BARAT	100
24	PAPUA BARAT DAYA	100
25	PAPUA SELATAN	100
26	PAPUA TENGAH	100
27	RIAU	100
28	SULAWESI BARAT	100
29	SULAWESI SELATAN	100
30	SULAWESI TENGAH	100
31	SULAWESI TENGGARA	100
32	SULAWESI UTARA	100
33	SUMATERA BARAT	100
34	SUMATERA SELATAN	100
35	SUMATERA UTARA	100
36	INDONESIA	100

Formula Perhitungan :  $\frac{PP}{PI} \times 100$

Keterangan :  
 PP: provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsector pengangkutan ikan kewenangan Gubernur  
 PI: provinsi di Indonesia (37)

- \* 35
- \* 37
- \* 35/37
- \* 100

h. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 11. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

No	Provinsi	Ketersediaan Akses Aplikasi				Persentase (%)
		Januari	Februari	Maret	April	
1	ACEH	100	100	100	100	100
2	BALI	100	100	100	100	100
3	BANTEN	100	100	100	100	100
4	BENGKULU	100	100	100	100	100
5	DI. YOGYAKARTA	100	100	100	100	100
6	DKI. JAKARTA	100	100	100	100	100
7	BOGORNTAL	100	100	100	100	100
8	JAWA BARAT	100	100	100	100	100
9	JAWA TENGAH	100	100	100	100	100
10	JAWA TIMUR	100	100	100	100	100
11	KALIMANTAN BARAT	100	100	100	100	100
12	KALIMANTAN SELATAN	100	100	100	100	100
13	KALIMANTAN TIMUR	100	100	100	100	100
14	KALIMANTAN UTARA	100	100	100	100	100
15	KEPULAUAN BANGKA BEL.	100	100	100	100	100
16	KEPULAUAN MERU	100	100	100	100	100
17	LAMPUNG	100	100	100	100	100
18	HALUO	100	100	100	100	100
19	HALUO UTARA	100	100	100	100	100
20	LAGA TENGGARA BARAT	100	100	100	100	100
21	LAGA TENGGARA TIMUR	100	100	100	100	100
22	PAPUA	100	100	100	100	100
23	PAPUA BARAT	100	100	100	100	100
24	PAPUA BARAT DAYA	100	100	100	100	100
25	PAPUA SELATAN	100	100	100	100	100
26	PAPUA TENGAH	100	100	100	100	100
27	RIAU	100	100	100	100	100
28	SULAWESI BARAT	100	100	100	100	100
29	SULAWESI SELATAN	100	100	100	100	100
30	SULAWESI TENGAH	100	100	100	100	100
31	SULAWESI TENGGARA	100	100	100	100	100
32	SULAWESI UTARA	100	100	100	100	100
33	SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100
34	SUMATERA SELATAN	100	100	100	100	100
35	SUMATERA UTARA	100	100	100	100	100
36	INDONESIA	100	100	100	100	100

